Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK dan Agenda Pembangunan Pertanian yang Tersisa

Rachmat Pambudy

Dosen Institut Pertanian Bogor

Abstract

A lot of achievement has been shown in the two years of the SBY-JK government period in various fields including political stability, respectable macro economic policy, controllable inflation; low interest rate; and improved devisa. However, SBY-JK still face serious problems, among them the high level of poverty figure which dominantly is found in the farmer community. This is very ironic, recalling that Indonesia is the agrarian country fertile soil which is also containing a lot of natural wealth. In the attempt to lessen the poverty level all at once to increase the farmer prosperity, it is very necessary to apply a business strategy and the agriculture agribusiness system where the government should keep consistent acting as the regulator, the facilitator, and the conducive business climate creator. To implement the agribusinenss strategy, it is needed two big policies i.e. (1) Agriculture Net Safety Program and (2) Agriculture Development Program. The first program pushes to be done, because at the time the agriculture is a sector which will pervade a lot of manpower. All at once the program can be used as the means for increasing the farmer capacity in a very short and rapid time. This includes (a) excellent seed and fertilizer incentives; (b) supporting incentive for farmer land certificate; (c) tackling water readiness problem; (d) agricultural based bioenergy; (e) financial/funding and investment incentives; and (f) service for education and health guarantees for farmer. The second program, in principle, develops agriculture continuously after the farmer base can be strengthened through the first program. Some activities or policies supporting the second program are (a) Development of agriculture and rural infrastructure; (b) Development of agricultural and technology program; (c) Technology dissemination and agricultural extension services; (d) Development of fair and promotional trade policy; (e) Development of agreement policy and international cooperation; (f) Development of farmer supporting institutional; and (g) Human resource development. If the macroeconomy policy can be best friends with the agribusiness system and business, and be supported with policy, strategy, and program for system development and agribusiness which are consistent and coordinated well, the strong and sturdy national food security can be achieved. This is very important as the base for continuous national economy growth, the high and smooth agribusiness growth, which is empty into the carried out the effective national economy development. This is one of challenges of SBY-JK government in handling various problems in the sector of agriculture through the make use of natural resource potential and the increase of competitiveness, so most poverty problems, unemployment and low competitiveness will be solved and all at once give the solution environment preservation problem.

Kita patut bersyukur atas keberhasilan pemerintah SBY-JK bersama rakyat Indonesia yang telah berprestasi meneruskan dan menggerakkan kembali roda pembangunan nasionalnya. Prestasi penting tersebut diantaranya mencakup peningkatan stabilitas politik dengan penyelesaian berbagai konflik horizontal; kebijakan ekonomi makro juga telah menunjukkan hasil yang *respectable*; inflasi semakin terkendali; suku bunga pinjaman rendah; dan cadangan devisa semakin meningkat. Selain itu kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai proaktif telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya investasi dan perdagangan antar negara. Keluarnya Indonesia dari kenggotaan IMF dan pembubaran CGI juga dapat dikatakan sebagai prestasi pemerintahan SBY-JK.

Di bidang hukum prestasi yang menonjol diantaranya terlihat pada pemberantasan KKN, penangkapan produsen dan bandar narkoba, serta pembalak liar hutan. Pemeriksaan dan penangkapan kasus KKN pada mantan pejabat tinggi setingkat menteri, gubernur dan bupati serta anggota DPRD, meskipun dituding sebagai tebang pilih, telah memberi angin segar pada penindakan hukum bagi para pelakunya. Sementara itu di bidang keamanan prestasi yang menonjol dapat dilihat pada peningkatan keamanan dan penanggulangan terorisme. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat telah dilakukan reformasi birokrasi, penataan otonomi daerah, dan peningkatan kerjasama antar daerah.

Di bidang ekonomi, menurut *The Economist 21st edition* awal Desember 2006, keberhasilan ini terlihat dari perbaikan indikator makro antara lain pertumbuhan PDB mencapai 6.0 persen setelah sebelumnya pada tahun 2004 dan 2005 juga mengalami pertumbuhan 5.1 persen dan 5.6 persen. Yang lebih fenomenal adalah pertumbuhan PDB per kapita hingga mencapai USD 1.590, yang meningkat sangat tajam dibanding dengan PDB per kapita di bawah USD 600 pada saat krisis ekonomi. Sementara itu pengendalian laju inflasi cukup berhasil pada tahun 2006 yaitu sekitar 7.0 persen meskipun pada tahun 2005 mencapai sekitar 17.11 persen.

Keberhasilan tersebut semestinya akan lebih baik jika diikuti oleh keberhasilan pada tingkat ekonomi mikro walaupun masih terdapat permasalahan mendasar yang harus segera ditangani. Meskipun berbagai indikator makro banyak mengalami perbaikan, namun kita masih harus bekerja keras lagi untuk menangani persoalan mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan. Seperti yang diumumkan oleh BPS bahwa tingkat kemiskinan pada Maret 2006 menjadi 39.05 juta jiwa (17.75 persen), meningkat dari 35.10 juta jiwa (15.97 persen) pada Februari 2005. Sèmentara itu, lebih dari 60 persen jumlah penduduk miskin tersebut terdapat di sektor pertanian dan pedesaan. Memang ironis, dengan peran dan posisi strategis sektor pertanian terhadap pembangunan nasional baik melalui sumbangan PDB, penyerapan tenaga kerja dan penguatan konsumsi, namun di sisi lain masih menyimpan berbagai permasalahan yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini menyebabkan sektor pertanian semakin menjadi kurang menarik. Kontribusi pendapatan petani justru mulai banyak dihasilkan dari kegiatan-kegiatan non pertanian.

Salah satu akibatnya adalah terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang dianggap lebih menguntungkan, tetapi ternyata dapat menimbulkan potensi kerawanan pangan. Dengan jumlah penduduk sekitar 248.9 juta jiwa (*Economist, special edition* Desember 2006), yang juga harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah konsumsi pangan yang besar. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pangan tersebut tetapi yang terjadi selanjutnya justru kebalikannya yaitu semakin meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan dan ancaman kedaulatan pangan nasional. Sejak tahun 2005, penurunan produksi beras yang lebih rendah dari konsumsi menjadi ancaman serius. Ini akibat dari gejolak anomali dan perubahan iklim dunia yang menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga meningkatkan kegagalan tanam dan panen padi yang berimplikasi pada penurunan produksi beras.

Padahal dengan keunggulan komparatif sebagai salah satu negara tropis terbesar di dunia, produk pertanian dapat dijadikan sebagai produk yang memiliki keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional. Untuk itu kita harus menghindari upaya pelemahan secara sistematis pada penurunan kemampuan nasional di bidang pertanian. Pemerintah harus memegang komitmen penuh pada implementasi otonomi daerah dan desentralisasi untuk pengembangan pertanian. Selain itu, pemerintah juga tetap harus memegang komitmen kepada kesepakatan dan perjanjian internasional yang menguntungkan petani dan produk pertanian Indonesia.

Dengan model posisi dan peranan pemerintah di atas maka pada pokoknya pemerintah diarahkan untuk dapat mengembangkan kebijakan strategis dalam sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan ini dapat dirumuskan dalam dua kebijakan besar. Pertama, melalui pelaksanaan kebijakan *Agriculture Safety Net Program* yang bersifat *urgent* sebagai awal atau landasan mensejahterakan petani miskin dalam pembangunan pertanian. Kedua, melalui pelaksanaan kebijakan *Agriculture Development Program* yang merupakan program paralel sebagai kelanjutannya dalam rangka membangun kembali pertanian Indonesia. Program kedua ini dapat diimplementasikan melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan penelitian, pengembangan teknologi, pengembangan layanan penyuluhan pertanian, pelaksanaan proteksi dan promosi produk pertanian rakyat, kebijakan dan perjanjian serta kerjasama perdagangan internasional, dan pengembangan kelembagaan pertanian serta organisasi petani.

Kebijakan dan strategi pembangunan sistem dan usaha agribisnis ini dirumuskan dengan tetap berprinsip pada **posisi dan peranan departemen pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pencipta iklim usaha yang baik** terfokus pada kebijakan pengembangan peraturan dan program-program nasional yang mencakup seluruh masyarakat umum dan yang tidak dapat atau tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri. Dalam sisa tiga tahun pemerintahan SBY-JK, pembangunan pertanian yang khusus berorientasi pada program pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja pedesaan menjadi suatu keharusan. Kemiskinan, kekurangan pangan, dan pengangguran adalah ancaman bagi keberhasilan pemerintahan SBY-JK yang paling nyata dan harus segera dihadapi. Hanya melalui pembangunan pertanian dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis maka persoalan mendasar rakyat Indonesia dapat diselesaikan dengan baik.

A. *Agriculture Safety Net Program*

Program ini bersifat mendesak dan perlu segera diterapkan dalam rangka menguatkan kembali landasan untuk pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya landasan kuat dalam sektor ini terutama penguatan kondisi petaninya. Sejak terjadinya krisis ekonomi yang dilanjutkan dengan krisis energi akibat kenaikan harga minyak mentah maka petani khususnya petani tanaman pangan mengalami kesulitan luar biasa. Kesulitan ini terjadi karena kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya hidup (transportasi, pendidikan dan kesehatan) serta turunnya harga pokok penjualan produk pertanian pangan. Hal ini berakibat nilai tukar petani semakin turun dan daya beli petani pada produk non pertanian semakin rendah. Selain itu, dengan kondisi sekarang ini, dimana telah terjadi bencana wabah hama (wereng), penyakit (flu burung) dan juga kekeringan/kebanjiran maka kelaparan mudah timbul di daerah-daerah bencana.

Sementara itu, pada sektor pertanian masih ada beberapa kendala dan permasalahan mendasar yang berulang hampir setiap tahun seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat pertanian yaitu rendah dan tidak stabilnya harga produk pertanian, kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian, kesulitan mendapatkan modal, kelangkaan dan tingginya harga sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk dan pestisida), gangguan hama dan penyakit, serta gangguan pasar produk pertanian (serbuan beberapa produk pertanian impor secara ilegal). Oleh karena itu, diperlukan upaya antisipasi dan mempersiapkan program yang dapat memberikan penyelesaian dan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan demikian kemiskinan di sektor pertanian dan pedesaan dapat dikurangi secara cepat.

Pelaksanaan *Agriculture Safety Net Program* atau Program Jaring Pengaman Pertanian perlu dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa saat ini pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Program tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas petani dalam waktu singkat dan cepat. Kegiatannya dapat meliputi beberapa pengembangan usaha pertanian antara lain distribusi sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian), kegiatan budidaya pertanian (hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan) dan kegiatan pasca panen dan pemasaran komoditi pertanian serta kegiatan penunjang lain seperti jasa, finansial dan sebagainya. Dengan dukungan dana, salah satunya dana kompensasi dari subsidi BBM, program ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan di atas. Secara kongkrit program ini mencakup :

1. Insentif Benih Unggul dan Pupuk

Pemberian benih (padi, jagung, tebu dan kedelai) oleh pemerintah melalui BUMN seperti Sang Hyang Seri dan PERTANI, pupuk (urea, NPK dan pupuk untuk tebu) oleh BUMN pupuk, pestisida dan kredit murah (kredit ketahanan pangan) khususnya bagi petani tanaman pangan berlahan sempit. Mereka adalah kelompok yang berhak menikmati alokasi subsidi BBM. Tujuan program tersebut adalah agar merangsang dan mendorong petani miskin berproduksi bahan pangan sehingga ancaman kelaparan dan kekurangan pangan dapat diredam.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian karena benih dan pupuk yang berkualitas merupakan komponen utama dalam budidaya komoditas pertanian. Dengan penyaluran benih unggul, selain biayanya tidak terlalu mahal, program ini juga mudah diterapkan di lapangan dan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas usaha taninya. Dengan demikian, upaya ini juga tergantung dari upaya petani dalam pengelolaan usahanya sehingga diharapkan para petani tidak selalu mengandalkan faktor-faktor eksternal yang akan mengganggu kelangsungan usahanya.

2. Insentif Bantuan Sertifikasi Tanah Petani

Sertifikasi tanah massal dan murah bagi petani dan penduduk miskin di pedesaan telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui alokasi penggunaan dana subsidi BBM. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas modal petani dan secara langsung akan dapat meningkatkan kapasitas aset petani dan aset penduduk pedesaan.

Petani sebenarnya memiliki harta benda tetapi mereka mengalami kesulitan dalam proses untuk merepresentasikan kepemilikannya agar dapat dijadikan modal. Mereka memiliki rumah tetapi tidak memiliki sertifikat, mereka memiliki hasil pertanian tetapi tidak memiliki hak gadai, mereka memiliki usaha tetapi tidak memiliki perusahaan.

Supaya aset petani dapat direpresentasikan terutama dalam rangka peningkatan kemampuan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan, diperlukan sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, nilai aset yang dimiliki petani akan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, lembaga keuangan tidak akan ragu memberikan pinjaman modal bagi petani untuk pengembangan usaha.

3. Penanggulangan Masalah Ketersediaan Air

Pertanian sangat tergantung pada iklim dan cuaca, terutama ketersediaan air. Air memiliki fungsi sangat vital dalam pertanian. Tanpa air, kegiatan budidaya pertanian tidak dapat berjalan. Dengan adanya pergeseran iklim, saat ini ketersediaan air dan penggunaannya sudah mulai kritis sehingga perlu pengaturan lebih lanjut serta perbaikan dan perluasan sistem pengairan.

Dalam jangka pendek, kita harus bisa mengantisipasi setiap perubahan cuaca sehingga tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Kita perlu memiliki program sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi segala kemungkinan kelangkaan air. Antisipasi dampak kekeringan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan menyiapkan pompa-pompa air bertenaga listrik maupun mesin diesel; atau berbahan bakar bensin dan minyak tanah yang dapat digunakan oleh petani dan masyarakat umum untuk mengambil air dari sumbernya untuk keperluan irigasi maupun rumah tangga. Selain itu perlu disiapkan peralatan penjernih air atau saringan air untuk memperoleh air bersih bagi masyarakat. Bantuan penyediaan air bersih oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) juga sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih.

Dalam jangka menengah, perlu dilakukan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur seperti saluran irigasi untuk mendukung pembangunan pertanian. Infrastruktur irigasi ini telah dibuat oleh para pendahulu kita dengan susah payah, namun setelah itu kita tidak dapat memeliharanya dengan baik sehingga banyak saluran irigasi yang rusak bahkan sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini menyebabkan penyusutan luas lahan irigasi, yang kemudian berdampak pada penekanan luasan lahan pertanian dan penurunan produksi pangan nasional. Untuk itu, harus segera dilakukan pengerukan waduk yang sudah mulai berkurang karena adanya penumpukan tanah erosi. Hal ini penting untuk meningkatkan daya tampung waduk pada saat musim penghujan, dan menjadi simpanan cadangan air untuk musim kemarau berikutnya.

Untuk jangka panjang, kita mulai dengan penanaman kembali hutan yang rusak dan lahan-lahan kritis dengan tanaman keras dan tanaman lain yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Program ini harus segera dilakukan mengingat semakin parahnya kerusakan alam dan lingkungan yang terjadi sekarang ini sehingga perlu penanganan yang lebih serius. Selain itu perlu pembuatan program penciptaan hutan cadangan pangan seperti sukun, talas, iles-iles dan tanaman lainnya yang dapat memperbaiki kondisi tanah sekaligus memberikan cadangan dan upaya diversifikasi pangan.

4. *Bio Energy* Berbasis Pertanian

Kita harus menyadari bahwa persediaan minyak bumi akan semakin menipis dan tidak dapat lagi menopang kebutuhan energi. Bahan bakar yang berbasis pada *unrenewable resources* ini bukan tidak mungkin akan semakin habis kita eksplorasi. Oleh karena itu, sudah semestinya dilakukan pencarian alternatif bahan bakar yang dapat terbaru seperti bahan bakar minyak sawit, jagung, jarak (*Jatropha curcas L.*), atau singkong. Ini merupakan potensi dan tantangan bagi pertanian dalam pengembangan *bioenergi* ini. Selanjutnya perlu pengembangan model kerjasama antar subsistem dalam program budidaya dan pengolahan.

Program budidaya komoditas bahan baku alternatif yang cepat sebagai pengganti solar diantaranya adalah budidaya ubi, ubi kayu, tebu, jagung, pohon jarak, kelapa serta kelapa sawit. Program budidaya ini akan menyerap tenaga kerja di pedesaan secara cepat, memberikan pendapatan langsung, dan yang penting dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur atau lahan kritis dalam waktu singkat. Dengan dukungan mesin pengolahan sederhana, bahkan minyak jarak ini diharapkan dapat menjadi alternatif bahan bakar alat dan mesin pertanian di pedesaan, bahan bakar perahu nelayan dan perahu alat angkut di sungai-sungai pedalaman. Jika alokasi subsidi BBM dilakukan pada program ini, kelangkaan solar atau minyak tanah serta bensin dengan cepat teratasi, sehingga cepat atau lambat ketergantungan pada minyak bumi dapat dikurangi.

5. Insentif Keuangan/Pembiayaan dan Investasi

Program ini dapat dilakukan melalui penyediaan paket kredit berbunga rendah. Dengan demikian, petani merasa sangat terbantu dan ini merupakan upaya menghindari ketergantungan para pelaku agribisnis terhadap uluran tangan pemerintah melalui program bantuan langsung. Kredit ini diupayakan agar lebih sederhana dalam prosedurnya, suku bunga yang kondusif serta sistem agunan yang tidak terlalu rumit dan dapat dipenuhi oleh petani.

Selain itu, pemberian fasilitas dapat berupa kemudahan akses petani ke lembaga keuangan atau perbankan melalui subsidi bunga. Selama ini bunga kredit di perbankan masih sangat memberatkan bagi usaha pertanian. Pemberian subsidi bunga akan cukup meringankan petani. Ini diharapkan dapat juga mendorong pengembangan investasi bagi petani untuk meningkatkan nilai tambah produknya dalam sub sistem pengolahan sehingga keuntungan nilai tambah produk juga dapat dinikmati oleh petani.

Sebenarnya upaya untuk meningkatkan akses petani ke perbankan sudah dilakukan oleh pimpinan nasional Indonesia dan oleh bank di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian Bank dengan kondisi dan realitas petani. Namun hingga sekarang pengembangan institusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil belum tampak nyata hasilnya. Oleh karena itu, ke depan, program ini perlu dilanjutkan kembali dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

6. Pelayanan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan bagi Petani

Layanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, serta perumahan murah sangat penting diberikan bagi keluarga petani dan penduduk pedesaan yang miskin.

Dalam jangka pendek, dampak program ini kurang menampakkan hasilnya, akan tetapi dalam jangka menengah dan panjang, jika dijalankan dengan benar, program ini akan meningkatkan kapasitas petani dan penduduk pedesaan. Layanan ini memang bukan dari program departemen pertanian tapi untuk petani.

Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat petani dilakukan dengan pelayanan asuransi kesehatan. Program ini sudah mulai berjalan dengan baik melalui pelayanan asuransi kesehatan oleh PT. ASKES yang sudah dapat diakses oleh penduduk miskin. Program ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan terutama dalam menjangkau masyarakat pedesaan.

Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan dalam aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Dengan jaminan pelayanan kesehatan ini, secara tidak langsung, akan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas petani. Dengan demikian, pelayanan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

B. *Agriculture Development Program*

Setelah program penguatan landasan petani, diharapkan dapat mendukung semua program pembangunan pertanian baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis, program pembangunan pertanian Indonesia diimplemetasikan dalam berbagai kegiatan yang mencakup :

1. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan

Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia sudah luar biasa tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang cepat tersedia yang juga sekaligus dapat memberikan manfaat bagi pembangunan pedesaan diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang berupa jalan desa, jembatan, pasar desa, irigasi mikro, sekolah di pedesaan, dan pelabuhan nelayan. Pengembangan infrastruktur ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang akan mendukung usaha perekonomian pada saatnya nanti sehingga apabila terjadi *booming* peningkatan ekonomi, kita sudah siap dalam penyediaan infrastruktur dalam menunjang kegiatan ekonomi tersebut.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi urbanisasi yang selalu menimbulkan masalah sosial di perkotaan karena adanya pengembangan infrastruktur yang langsung dapat melayani (*in agriculture*) dan merangsang (*for agriculture*) tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan pertanian dan agribisnis di daerah pedesaan. Di masa kelesuan ekonomi formal seperti ini, pembangunan infrastruktur irigasi pedesaan, jalan akses pedesaan dan pertanian, dan infrastruktur telekomunikasi pedesaan-pertanian perlu diperjuangkan. Tampaknya hal ini kurang mendapat perhatian dari kalangan investor dan pemerintah belakangan ini, padahal program tersebut dalam jangka pendek akan mengurangi pengangguran di kota dan di desa; sedangkan pada jangka menengah dan panjang akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan.

2. Pengembangan Program Penelitian dan Teknologi

Penelitian dan pengembangan di saat krisis perlu diarahkan untuk mempercepat diseminasi teknologi baru dan menciptakan sistem insentif bagi penemuan teknologi dan inovasi baru terutama di area penemuan bibit/benih unggul, inovasi pemupukan dan pemberantasan hama penyakit, teknologi proses dan inovasi produk olahan berbasis bahan baku komoditas pertanian, dan teknologi pemetaan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan khususnya tanah dan air; melalui pola kemitraan dan keterkaitan/ sinergi dengan pihak swasta, perguruan tinggi, LSM dan organisasi petani, dan badan-badan internasional.

Saat ini perlu diinisiasi kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan para pengguna BBM (bahan bakar minyak) utama seperti Pertamina, PLN, dan lain lain untuk menemukan teknologi dan inovasi proses dan produk bahan bakar alternatif dari komoditas pertanian seperti biodiesel, minyak jarak, dan energi dari biomassa lainnya. Potensi pasar produk baru ini sangat besar dan potensinya juga sangat besar, dan dapat dipastikan akan meningkatkan pendapatan petani yang mengusahakannya. Implementasi hasil penelitian yang dapat mengatasi kelangkaan energi, khususnya bahan bakar solar perlu dipercepat. Program-program pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian perlu segera dilaksanakan di seluruh Indonesia.

3. Kebijakan Layanan Diseminasi Teknologi dan Penyuluhan Pertanian

Sejak diundangkannya RUU Penyuluhan tanggal 15 November 2006, layanan penyuluhan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis diarahkan agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari para petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya sehingga mereka dapat secara langsung menikmati nilai tambah dari usahanya. Dalam kerangka itu, layanan penyuluhan dikembangkan selaras dengan jiwa otonomi daerah dan desentralisasi, dalam pengertian bahwa layanan penyuluhan ini didorong untuk dapat menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah (lebih efisien dan efektif di tingkat kabupaten/kota) dengan mengefektifkan sumber daya manusia dan kelembagaan yang sudah ada; dikembangkan layanan penyuluhan yang spesifik lokasi dan spesifik komoditas serta juga mencakup sistem agribisnis di hulu, *on-farm*, dan hilir, bahkan di sektor penunjangnya.

Dalam pengembangan program penyuluhan, perlu dipertegas bahwa dalam hal usaha tani dan ekonomi rumah tangga, petani adalah tetap pihak yang paling paham dan mengerti serta ahli dalam menjalankannya. Hal ini akan lebih efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan karena yang perlu diperkuat adalah para penyuluh yang selama ini telah menghabiskan waktu dan pikiran mereka langsung dengan petani di pedesaan, daripada mengintroduksi program atau kegiatan baru yang memanfaatkan sumber daya manusia di luar kelembagaan penyuluh. Program pendampingan atau sejenisnya pada masa yang lalu telah mengajarkan pengalaman dan pelajaran yang berharga buat kita untuk tidak lagi mengulanginya.

4. Pengembangan Kebijakan *Fair Trade* dan Promosi

Dalam situasi dan kondisi perdagangan internasional yang relatif bebas tetapi kurang adil (*free but unfair*), pertanian *on-farm* kita masih perlu mendapatkan proteksi dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil melalui kebijakan perdagangan yang mengatur dan membatasi (*protective policies*). Namun demikian, bersamaan dengan itu, perlu terus dikembangkan dukungan kebijakan promosi yang diarahkan membantu para petani untuk dapat meningkatkan daya saing dan daya penetrasi di perdagangan internasional. Kebijakan promosi dalam rangka meningkatkan daya saing dan daya penetrasi ini ditargetkan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan standar kualitas produk petani dan pengusaha di bidang agribisnis untuk dapat bersaing dengan produk yang sama di pasar internasional.

5. Pengembangan Kebijakan Perjanjian dan Kerjasama Internasional

Posisi Indonesia dalam perdagangan global haruslah tetap ditempatkan dan dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia. Instrumen-instrumen perdagangan seperti bea masuk, tarif, pajak ekspor, dan hambatan non-tarif lainnya harus dirancang dalam kerangka memperkuat struktur industri dalam negeri termasuk agroindustri, dan mampu merangsang pertumbuhan industri yang ada bahkan menciptakan industri nasional baru. Disamping itu, perjanjian dan kerjasama internasional yang ada juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kekuatan dan pangsa pasar serta menciptakan pasar baru bagi perdagangan produk-produk agribisnis nasional, dan juga mampu mengawal pasar dalam negeri dari ancaman penetrasi produk-produk luar negeri yang merugikan perekonomian nasional. Program ini juga diarahkan untuk menjaring investasi di sektor pertanian khususnya perkebunan agar lebih terarah dan menguntungkan petani.

6. Pengembangan Kelembagaan Penunjang Petani

Dalam pembangunan agribisnis, kelembagaan yang dikembangkan tidak cukup hanya sekedar unit-unit fisik yang tidak berkelanjutan, tetapi perlu dikembangkan unit-unit usaha yang terintegrasi baik secara horisontal maupun vertikal yang berdaya saing dan yang mampu tumbuh serta berkompetisi secara adil di pasar internasional. Salah satu kelembagaan dasar yang perlu dipertahankan dan dikembangkan secara terus menerus adalah kelembagaan asosiasi atau himpunan atau organisasi petani yang solid, kuat, berpengaruh, dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi, keinginan, dan usaha para anggotanya.

Mungkin contoh konkrit yang paling aktual yang dapat dijadikan acuan diantaranya adalah kelembagaan petani HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), BK-APTRI (Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan). Kelembagaan lain yang sampai saat ini masih perlu terus didorong agar lebih bersahabat dengan agribisnis adalah kelembagaan keuangan. Program bantuan penyediaan modal (*credit program*) yang sifatnya langsung berupa bantuan modal saja dapat menyebabkan ketergantungan para pelaku agribisnis terhadap uluran tangan pemerintah. Oleh karena itu, fokus program mendatang perlu lebih ditujukan pada pengembangan lembaga keuangan untuk menjadi sumber permodalan bagi usaha-usaha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga murah dan terjangkau, serta sistem agunan yang mudah dipenuhi petani. Untuk itu sudah seharusnya ada lembaga keuangan yang khusus menangani pertanian (BRI atau Bukopin dapat diarahkan untuk melayani kredit pertanian skala kecil dan menengah). Selain itu, perlu juga peningkatan usaha penjaminan produk petani. Selama ini BULOG hanya menampung kurang dari 10 % produksi beras nasional. Peningkatan kapasitas BULOG agar menyerap lebih banyak jumlahnya dan jenisnya (jagung, gula, kedelai dan lain-lain) akan sangat membantu stabilitas harga di tingkat petani yang sering kali jatuh pada saat panen.

7. Pengembangan SDM

Untuk membangun sistem agribisnis, paling sedikit terdapat tiga sasaran penting pengembangan SDM agribisnis di Indonesia. **Pertama** adalah mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan usaha agribisnis; **Kedua**, mengembangkan kemampuan kewirausahaan (*enterpreneurship*) sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan **Ketiga,** mengembangkan kemampuan *team work.*

Sumber daya manusia agribisnis dalam hal ini mencakup SDM agribisnis pelaku langsung seperti tenaga kerja yang bekerja pada sub-sektor agribisnis hulu, sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub-sektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan SDM penyedia jasa bagi agribisnis.

Dengan prasyarat kebijakan makroekonomi yang bersahabat dengan sistem dan usaha agribisnis, serta dengan kebijakan, strategi, dan program pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik, maka dapat diharapkan tercapainya ketahanan pangan nasional yang kuat dan kokoh sebagai landasan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, pertumbuhan usaha agribisnis yang tinggi dan merata sebagai alat pemerataan pembangunan ekonomi nasional yang efektif, serta yang sangat aktual bagi bangsa kita saat ini adalah dapat terciptanya bahan bakar alternatif baru untuk mengatasi krisis energi yang melanda bangsa dan negara saat ini. Melalui gambaran di atas, kita dapat berharap, bahwa pendapatan dan kesejahteraan petani, yang merupakan pangsa terbesar penduduk kita, dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga momentum pertumbuhan tetap terjaga dan stabilitas pemerintahan dapat dipertahankan.

Inilah salah satu tantangan pemerintahan SBY-JK dalam agenda selanjutnya di samping agenda lain seperti upaya penyederhanaan prosedur usaha, upaya penurunan beban pajak perusahaan serta mendorong investasi di bidang infrastruktur khususnya di sektor pertanian dan pedesaan. Semestinya, dengan mengatasi berbagai permasalahan pada sektor ini melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan upaya peningkatan daya saing, maka sebagian besar masalah kemiskinan, pengangguran dan rendahnya daya saing akan dapat terselesaikan dan sekaligus memberikan solusi masalah kelestarian lingkungan.

Sudah saatnya kita kembali menyadari akan peran dan posisi penting pertanian ini dengan memperhatikan segala tantangan dan permasalahan serta memberikan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif. Pendekatan pembangunan pertanian oleh pemerintah SBY-JK melalui strategi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(RPPK) yang *pro poor, pro growth* dan *pro job*, sebetulnya sudah tepat arah. Namun strategi ini harus diupayakan dalam penyelesaian permasalahan pertanian secara integral dari hulu sampai hilir.

Pada sub sistem hulu, strategi revitalisasi dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pedesaan, koordinasi suplai dan distribusi sarana dan prasarana pertanian meliputi pupuk, benih, obat-obatan. Sedangkan pada sub sistem *on-farm*, perlu dilakukan kebijakan pertanahan dan tata ruang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Di lain pihak, pada sub sistem hilir, perlu dilakukan melalui kebijakan ketahanan pangan dan kebijakan perdagangan produk pertanian dalam rangka meningkatkan daya saing. Penjabaran yang tepat pada kebijakan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mencakup sub sistem hulu hingga ke hilir serta pendukungnya (agribisnis) merupakan pilihan kebijakan unggulan yang dapat dijadikan dasar untuk membangkitkan kembali kekuatan perekonomian rakyat Indonesia ke depan.

Persoalan yang harus segera dilakukan saat ini adalah implementasi kebijakan karena strategi revitalisasi belum terlaksana dengan baik. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi dan sinkronisasi di tingkat aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah menjadi salah satu hambatan implementasi. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab para menko, menteri, gubernur dan bupati serta aparat lain dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Inilah perlunya dukungan implementasi dalam penjabaran dan pelaksanaan kebijakan hingga menjadi suatu program dan kegiatan. Suatu kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan implementasi yang kuat dalam pelaksanaannya di lapangan. Jadi, persoalannya tinggal bagaimana strategi revitalisasi dapat terlaksana dengan baik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia termasuk para petaninya. Dengan demikian, sisa waktu tiga tahun pemerintahan SBY-JK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

________ (1998). *International Agricultural Development (3rd Ed)*. London: The Johns Hopkins University Press.

________ (1999). *Trends and Perspectives in Agricultural Education in Asia-Pacific: Report of the APO Symposium on Agricultural Education System held in Tokyo from 29 July to 5 August 1997*. Tokyo: Asian Productivity Organization.

________ (2005). *Menumbuhkan Ide dan Pemikiran Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis : 60 Tahun Bungaran Saragih* (Editor : Bayu Krisnamurthi). Bogor: PSP3-IPB.

________ (2005). *Pelaku Berkisah : Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an (Editor : Wie, T. K.)*. Jakarta: Kompas.

Barrow, C.(2001). *Incubators : A Realist Guide to the World's New Business Accelerators*. New York: John Wiley & Sons.

De Soto, H. (2001). *Mistery of The Capital : Why Capitalsm Triumphs in The West and Fails Everywhere Else*. New York: Basic Books.

Departemen Pertanian. (2001). *Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional*, Jakarta : Departemen Pertanian.

Departemen Pertanian. (2002). *Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional*, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jendral Departemen Pertanian. Jakarta.

Djojohadikusumo, S.(1993). *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Kuliah Perdana Universitas Terbuka)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hill, H. (2001). *Ekonomi Indonesia*. (Edisi Kedua). Jakarta: Murai Kencana.

Horton, P. B. dan C. L. Hunt. (1984). *Sosiologi. Jilid 2*. (Edisi Keenam,). Jakarta: Erlangga.

Hubeis, A.V.S, P. Tjitropranoto, dan W. Ruwiyanto. (1992). *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta : PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Husodo, S.Y. dkk.(2004). *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Depok: Penebar Swadaya.

International Fund for Agrigultureal Development. (2001). *The Chalenge of Ending Rural Poverty Rural Poverty Report*. New York: Oxford University Press.

International Fund for Agricultural Development.(2002). *Assessment of Rural Poverty Asia and The Pacific*. Rome.

Kadin Indonesia. (2004). *Revitalisasi Industri dan Investasi,* Sumbangan Pemikiran Kadin-Indonesia untuk Pemerintah Indonesia periode 2004-2009.

Kementrian Koordinator Bidang Pertanian. (2005). *Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia 2005.*

Madeley, J. (2002). *Food for All.* London: Zed Books.

Naisbitt. (1996). *Megatrends Asia : Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia* (Terjemahan dari judul asli : *Megatrends Asia : The Eight Asian Megatrends that are Changing the World*). Jakarta: Gramedia.

Pambudy, N.M. (1992). *Agroindustri, Pilihan Utama Pembangunan Ekonomi PJPT II.* Kompas 19 Oktober 1992.

Pambudy, R.(1996). *Pilihan Teknologi dan Industri untuk Lepas Landas : Catatan tentang Widjojonomics dan Habibienomics (Bisnis dan Kewirausahaan dalam Sistem Agribisnis : Kumpulan Pemikiran, 2003.* Editor : Pambudy, R. dkk). Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

Pambudy, R. (2004). *Sistem Agribisnis Sebagai Agenda Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Era Persaingan Global.* Tulisan yang belum secara resmi dipublikasikan.

Pambudy, R. (2005). Peningkatan Posisi Tawar Petani : Sebuah Harapan dari Program Revitalisasi Pertanian (Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Indonesia dan Prospek Pertanian Indonesia di Era Globalisasi dan AFTA. Diselenggarakan oleh BEM STPP Bogor.

Pidato Menteri Pertanian pada Pertemuan dengan Harian Umum Kompas Tanggal 10 Agustus 2004. *Sektor Pertanian : Dari Stagnasi Menuju Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan*, Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. (2003). *Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis).* Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Rusastra I.W., dkk. (1999). *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian (Buku 1)*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.

Sachs, J. (2005). *The End of Poverty : How We Can Make It Happen in Our Lifetime.* New York: Penguin Books.

Saragih, B. (1995). *Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad ke-21.* Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Saragih, B., T, Sipayung dan R. Pambudy. (2000). *Kumpulan Pemikiran; Agribisnis Berbasis Peternakan*, Bogor : Yayasan USESE dan Pusat Studi Pembangunan IPB.

Saragih, B. (2001). *Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis (Edisi Kedua).* Bogor: Pustaka Wira Usaha Muda.

Saragih, B. (2001). *Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (kumpulan Pemikiran).* Bogor: Pustaka Wira Usaha Muda.

Saragih, B., T. Sipayung dan R. Pambudy. (2001). *Kumpulan Pemikiran : Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian.* Jakarta: Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT. Suveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB dan Unit for Social and Economic Studies and Evaluation (USESE) Foundation.

Saragih, B. (2001). *Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis.* Jakarta: Yayasan USESE bekerjasama dengan SUCOFINDO.

Saragih, B. (2004). *Situasi Ketahanan Pangan Nasional tahun 2003 sampai Semester I 2004 : Cenderung Semakin Membaik.* Bahan Wawancara Menteri Pertanian di TVRI Tanggal 28 Agustus 2004 dalam Rangkaian Kegiatan "Gotong Royong Merajut Masa Depan".

Schultz, T. W. (1979). *Investing in People : The Economics of Being Poor (International Agricultural Development : Edited by : Eicher, C. K. and Staatz, J. M.).* London: The Johns Hopkins University Press.

Simmons, P.(1995). *Words into Action : Basic Right and The Campaign against World Poverty.* UK and Ireland: An Oxfam Publication.

Soesastro, H., Smith, A.L. & Ling H.M.(2003). *Governance in Indonesia : Challenges Facing The Megawati Presidency.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Stiglitz, J. E. (2003). *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional (Alih Bahasa : Lukman A.).* Jakarta: PT. Ina Publikatama.

Stiglitz, J. E. (2006). *Making Globalization Work.* New York : W.W. Norton & Company.

The World Bank.(2004). *World Development Report 2004 : Making Services Work for Poor People.* A Copublication of The World Bank and Oxford University Press.

Todaro, M. P. and Smith, S.C. (2003). *Economic Development (8^{th} Ed).* UK: Pearson Education Ltd.

Ul-Haq, M. (1994). *Tirai Kemiskinan: Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yudhoyono, S.B. dan Harniati. (2004). *Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Mengapa Tidak Cukup dengan Memacu Pertumbuhan Ekonomi?* Jakarta: Brighten Press.